KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBNKiTA

KINERJA DAN FAKTA

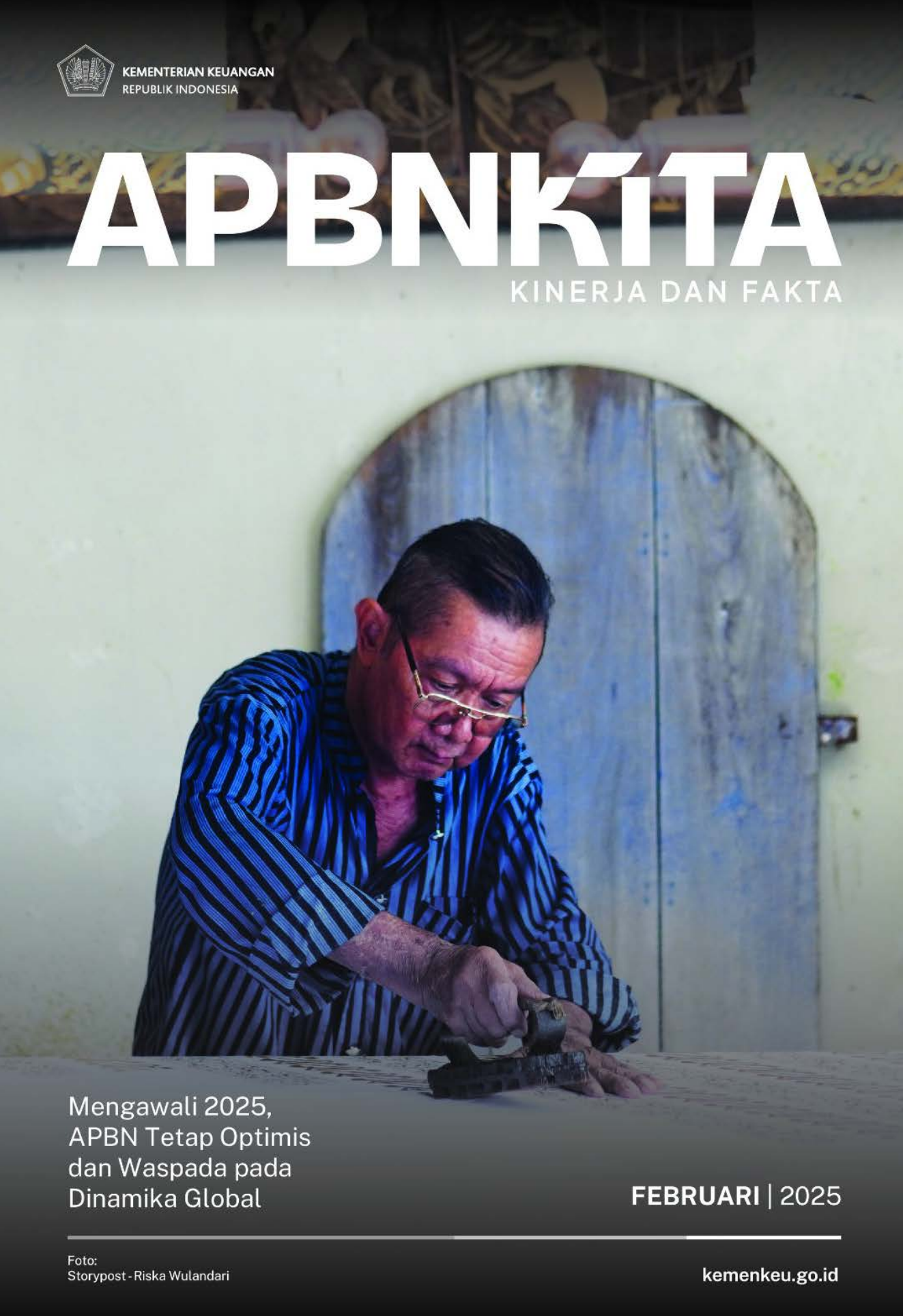

Mengawali 2025, APBN Tetap Optimis dan Waspada pada Dinamika Global

FEBRUARI | 2025

Foto:
Storypost - Riska Wulandari

kemenkeu.go.id

Scan dan Unduh
APBN KITA

ISSN link
APBN KiTa

“Memasuki tahun 2025, pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional, meskipun kita menghadapi berbagai gejolak dinamika global. Kami akan mengoptimalkan APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat , salah satunya dengan mempercepat belanja pada program-program prioritas sesuai arahan Presiden.”

Sri Mulyani Indrawati

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF 7

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 13

POSTUR APBN 17

Penerimaan Perpajakan 21

Penerimaan Kepabeanan & Cukai 25

Penerimaan Negara Bukan Pajak 31

Belanja Pemerintah Pusat 35

Transfer ke Daerah 39

Pembiayaan Utang 45

Laporan Khusus 53

Penerimaan Pajak	88,89
Penerimaan Bea & Cukai	26,29
Penerimaan Negara Bukan Pajak	42,13
Penerimaan Hibah	0,98
Belanja Kementerian/Lembaga	24,38
Belanja Non Kementerian/Lembaga	61,66
Transfer ke Daerah	94,73

Dalam Triliun Rupiah

Foto: Pexels - Sora Shimazaki

Ringkasan Eksekutif

Memasuki awal 2025, perkembangan ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Ketidakpastian ini terutama dipengaruhi oleh tekanan geopolitik, perang dagang, dan volatilitas harga komoditas. Proyeksi IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 tetap stabil di level 3,1 persen. Ketidakpastian global ini mendorong fluktuasi harga komoditas global, terutama minyak mentah. Kebijakan moneter The Fed dalam menetapkan suku bunga acuan cenderung tetap, dan menunggu dampak dari kebijakan perdagangan di Amerika Serikat. Kondisi likuiditas keuangan global sempat mengalami tekanan, yang kemudian berdampak

Proyeksi IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 tetap stabil di level 3,1 persen.

pada pasar keuangan di negara-negara berkembang (*emerging markets*). Di tengah dinamika global, perekonomian nasional diperkirakan tetap kuat, didukung oleh aktivitas manufaktur yang mulai menguat serta pelaksanaan reformasi struktural ekonomi nasional.

Perpajakan

Hingga akhir Januari 2025, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp157,32 triliun atau mencapai 5,24 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2025[1]. Realisasi sementara komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp115,18 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp42,13 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp0,01 triliun dengan capaian masing-masing terhadap target 4,62 persen, 8,20 persen dan hibah 1,69 persen.

Penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, hingga akhir Januari 2025 realisasi penerimaan Pajak tercatat Rp88,89 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Rp26,29 triliun. Realisasi penerimaan sementara Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing mencapai 4,06 persen dan 8,72 persen terhadap target. Kinerja perpajakan periode ini lebih dipengaruhi oleh faktor restitusi, kebijakan optimalisasi penerimaan, dan didukung oleh peningkatan aktivitas dalam negeri dan kinerja ekspor yang menunjukkan kegiatan ekonomi yang masih tumbuh, serta kinerja cukai dan pajak internasional yang memberikan kontribusi secara positif terhadap kinerja perpajakan.

Secara nominal, penerimaan sementara Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp57,78 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp24,62 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan sementara Pajak masing-masing 65,00 persen dan 27,70 persen. Secara lebih detil, PPh Nonmigas berdasarkan nominal penerimaannya ditopang oleh penerimaan yang bersumber dari PPh 21, PPh Final, PPh Pasal 23, dan PPh 22 Impor, dengan kontribusi masing-masing 27,60 persen, 20,02 persen, 13,93 persen, dan 10,54 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas.

Hingga akhir Januari 2025, capaian sementara penerimaan Kepabeanan dan Cukai bersumber dari penerimaan Cukai Rp19,97 triliun, Bea Masuk (BM) Rp3,87 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp2,45 triliun. Secara lebih detil, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama bersumber dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berkontribusi mencapai 73,91 persen terhadap total penerimaannya. Berdasarkan pertumbuhannya, kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami pertumbuhan positif di semua komponen penerimaannya, bahkan penerimaan BK tumbuh sangat signifikan. Hingga akhir Januari 2025 kinerja penerimaan CHT masih dipengaruhi terutama oleh kenaikan produksi rokok golongan II dan III, meskipun produksi golongan I masih menurun. Selanjutnya, kinerja BM lebih dipengaruhi oleh peningkatan impor komoditas utama dan penguatan nilai tukar Dollar terhadap Rupiah. Di sisi lain, kinerja BK yang terus meningkat signifikan didorong oleh BK produk sawit yang meningkat akibat rata-rata harga CPO yang masih cukup tinggi.

1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 2025

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi sementara PNBP hingga akhir Januari 2025 mencapai Rp42,13 triliun atau 8,20 persen terhadap target.

Kinerja Pendapatan SDA mencapai Rp16,98 triliun atau 7,79 persen dari target.

Realisasi PNBP yang berasal dari KND mencapai Rp10,88 triliun atau 12,09 persen dari target yang terutama berasal dari pembayaran dividen Perbankan (dividen interim BRI TB 2024).

Realisasi PNBP yang berasal dari pendapatan BLU mencapai Rp1,23 triliun atau 1,58 persen dari target.

Sementara itu, PNBP Lainnya terealisasi Rp13,03 triliun. Jika dibandingkan APBN, capaian PNBP Lainnya mencatatkan kinerja 10,20 persen dari target.

Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2025 mencapai Rp180,77 triliun (4,99 persen terhadap APBN). Realisasi belanja tersebut terdiri atas Belanja Pusat tercatat Rp86,04 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun.

Realisasi belanja subsidi hingga 31 Januari 2025 mencapai Rp2,91 triliun atau 0,92 persen dari pagu APBN, realisasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp0,2 miliar. Subsidi energi mencatatkan realisasi Rp2,86 triliun, sementara subsidi nonenergi telah terealisasi sebesar Rp53,1 miliar.

Realisasi subsidi energi didominasi oleh subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg dengan capaian Rp0,83 triliun atau 0,73 persen dari pagu APBN. Adapun komposisi realisasi hanya berasal dari susbidi BBM yang terdiri dari subsidi Minyak Tanah dan Solar. Sedangkan untuk subsidi listrik yakni Rp2,02 triliun atau 2,26 persen dari pagu.

Sampai dengan 31 Januari 2025, subsidi bunga CPP merupakan satu-satunya komponen subsidi nonenergi pada subsidi bunga kredit program yang memiliki realisasi mencapai Rp53,1 miliar. Hal tersebut turut mencerminkan dukungan Pemerintah dalam mendukung peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan. Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi lainnya seperti subsidi pupuk, subsidi *Public Service Obligation* (PSO), maupun subsidi pajak belum tercatat realisasinya. Hal tesebut disebabkan karena masih dilakukannya proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian terkait.

Transfer Ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp94,73 triliun atau 10,30 persen dari pagu. Secara umum, capaian tersebut utamanya ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp12,63 triliun yang dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik lebih tinggi Rp0,24 triliun.

Sementara itu, penyaluran DBH mencapai Rp82,1 miliar atau 4,27 persen dari pagu, dan Dana Desa mencapai Rp964 miliar atau 1,36 persen dari pagu. Jenis dana TKD lainnya belum mencatatkan realisasi karena pemerintah daerah masih berproses dalam penyusunan Perda APBD dan pemenuhan syarat untuk penyaluran tahap I.

Pembiayaan

Keseimbangan Primer per 31 Januari 2025 tercatat positif Rp10,61

triliun. Sementara itu, defisit APBN tercatat Rp23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB.

Kinerja Pembiayaan Anggaran sebagai instrumen penting dalam menopang APBN cukup memadai. Realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Januari 2025 mencapai Rp154,04 triliun atau 25,00 persen dari pagu.

Realisasi Pembiayaan Utang tercatat Rp153,36 triliun atau 19,77 persen dari pagu, terdiri dari Surat Berharga Negara (Neto) Rp160,87 triliun dan Pinjaman (Neto) negatif Rp7,52 triliun. Pinjaman (Neto) berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) negatif Rp28,5 miliar dan Pinjaman Luar Negeri (Neto) negatif Rp7,49 triliun.

Pembiayaan Investasi tercatat Rp0,49 triliun dalam bentuk investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen) sebagai penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah. Selain itu Pemerintah juga memperoleh penerimaan Rp0,09 triliun atas pemberian pinjaman dan penerimaan atas Pembiayaan Lainnya Rp0,10 triliun.

Halaman Ini Dikosongkan

Prospek Ekonomi Nasional di Kuartal I 2025 Tetap Kuat

Foto: iStock

Perkembangan Ekonomi Makro

Meskipun menghadapi ketidakpastian eksternal, sepanjang 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,03 persen, mencerminkan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Stabilitas ekonomi dan politik nasional, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong realisasi investasi di berbagai sektor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada 2024 didorong oleh beberapa sektor utama, yaitu Industri Pengolahan yang tumbuh 4,5 persen, Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 4,8 persen, serta Informasi dan Komunikasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi 9,3

Stabilitas ekonomi dan politik nasional, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong realisasi investasi di berbagai sektor.

persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,9 persen, sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat 4,6 persen. Di tengah tantangan global, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tumbuh 3,2 persen, sedangkan impor meningkat 3,5 persen, mencerminkan aktivitas perdagangan yang tetap solid.

Di sisi kesejahteraan, kinerja ekonomi yang positif disertai dengan program perlindungan sosial turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, yang mencapai 8,57 persen pada September 2024, merupakan level terendah sejak BPS mulai merilis data kemiskinan pada 1960. Ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) juga mengalami perbaikan, berada di bawah level prapandemi 0,381 pada September 2024, meskipun sedikit meningkat 0,002 poin dibandingkan Maret 2024.

Memasuki 2025, prospek pertumbuhan ekonomi masih tetap kuat, didukung oleh indikator konsumsi masyarakat yang solid dan aktivitas manufaktur yang terus ekspansif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Januari 2025 berada di level 127,2, menunjukkan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prospek ke depan. Indeks Manufaktur PMI juga tetap berada di zona ekspansi, meningkat dari 51,9 pada Januari 2025 dibandingkan 51,2 pada Desember 2024. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan produksi dan permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun internasional.

Memasuki 2025, satbilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG): Pada penutupan perdagangan 12 Februari 2025, menguat ke level 6.646. Nilai Tukar Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tercatat Rp16.357 per USD atau terdepresiasi 1,2 persen dibandingkan awal 2025. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 20 Februari tercatat Rp16.293 per USD. Pada Januari 2025, inflasi tahunan Indonesia mencapai 0,76 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh diskon tarif listrik 50 persen dan penurunan harga tiket pesawat. Inflasi inti yang tidak memasukkan komponen harga yang bergejolak, sedikit meningkat menjadi 2,36 persen. Pada akhir Januari 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat USD156,1 miliar, meningkat dari USD155,7 miliar pada bulan sebelumnya.

Halaman Ini Dikosongkan

Sampai dengan 31 Januari 2025, APBN mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Rp157,32 triliun, dan Realisasi Belanja Negara Rp180,77 Triliun

Foto: Storypost - Mahardika Argha

Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Januari 2025 mencatatkan Pendapatan Negara yang mencapai Rp157,32 triliun (5,24 persen dari target). Realisasi tersebut terdiri atas:

- Penerimaan Perpajakan Rp115,18 triliun (4,62 persen dari target), yang terdiri atas Penerimaan Pajak Rp88,89 triliun (4,06 persen dari target) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp26,29 triliun (8,72 persen dari target).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp42,13 triliun (8,20 persen dari target).
- Penerimaan Hibah Rp9,8 miliar.

Di sisi Belanja Negara, sampai dengan 31 Januari 2025 telah terealisasi Rp180,77 triliun (4,99 persen dari pagu) terdiri atas:

APBN mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Rp157,32 triliun dan realisasi Belanja Negara Rp180,77 triliun.

Realisasi APBN s.d. 31 Januari 2024 – 2025

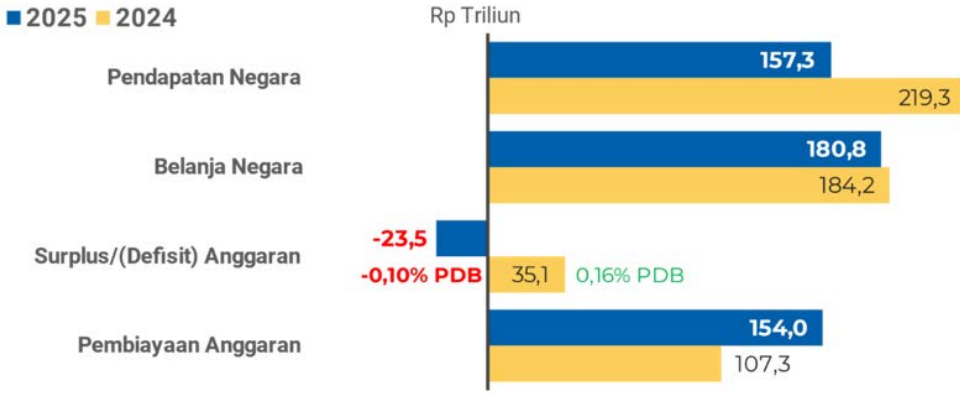

Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer

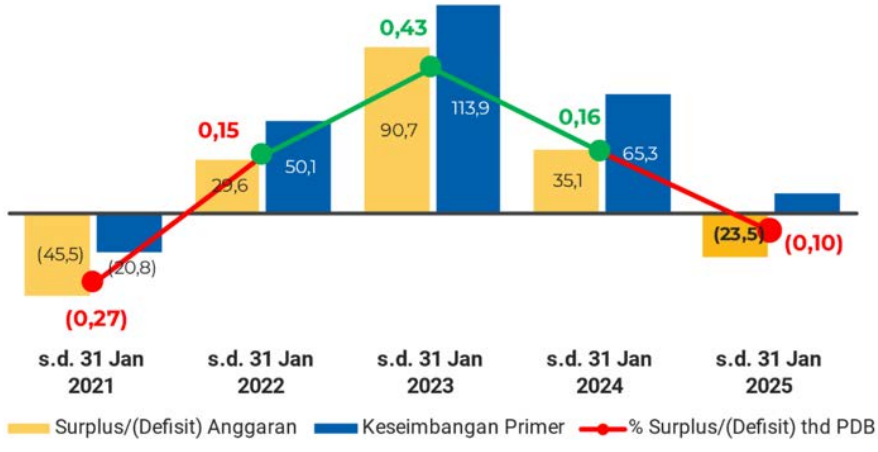

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 31 Januari 2025, APBN tercatat defisit Rp23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB.

• Belanja Pemerintah Pusat Rp86,04 triliun (3,19 persen dari pagu), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp24,38 triliun (2,10 persen dari pagu) dan realisasi Belanja non-K/L Rp61,66 triliun (4,00 persen dari pagu).

• Transfer ke Daerah mencapai Rp94,73 triliun (10,30 persen dari alokasi).

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, per 31 Januari 2025, APBN tercatat defisit Rp23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap PDB (per 31 Januari 2024, APBN tercatat surplus Rp35,12 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB). Sementara itu, Keseimbangan primer tercatat surplus Rp65,25 triliun (per 31 Januari 2024, surplus keseimbangan primer mencapai Rp65,25 triliun). Di sisi pembiayaan anggaran, realisasi mencapai Rp154,04 triliun (25,00 persen dari target).

.

Realisasi APBN s.d. 31 Januari 2024–2025

APBN (triliun rupiah)	2024			2025		
	APBN	Real s.d. 31 Jan	% thd APBN	APBN	Real s.d. 31 Jan	% thd APBN
A. Pendapatan Negara	**2.802,29**	**219,31**	**7,83**	**3.005,13**	**157,32**	**5,24**
I. Pendapatan Dalam Negeri	**2.801,86**	**219,26**	**7,83**	**3.004,55**	**157,31**	**5,24**
1. Penerimaan Perpajakan	2.309,86	175,80	7,61	2.490,91	115,18	4,62
a. Pajak	1.988,88	152,89	7,69	2.189,31	88,89	4,06
b. Kepabeanan dan Cukai	320,98	22,91	7,14	301,60	26,29	8,72
2. PNBP	492,00	43,45	8,83	513,64	42,13	8,20
II. Penerimaan Hibah	**0,43**	**0,05**	**11,91**	**0,58**	**0,01**	**1,69**
B. Belanja Negara	**3.325,12**	**184,19**	**5,54**	**3.621,31**	**180,77**	**4,99**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**2.467,53**	**96,41**	**3,91**	**2.701,44**	**86,04**	**3,19**
1. Belanja K/L	1.090,83	44,78	4,10	1.160,09	24,38	2,10
2. Belanja Non K/L	1.376,70	51,63	3,75	1.541,36	61,66	4,00
II. Transfer Ke Daerah	**857,59**	**87,78**	**10,24**	**919,87**	**94,73**	**10,30**
C. Keseimbangan Primer	**(25,51)**	**65,25**	**(255,84)**	**(63,33)**	**10,61**	**(16,76)**
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	**(522,83)**	**35,12**	**(6,72)**	**(616,19)**	**(23,45)**	**3,81**
% Surplus/(Defisit) thd PDB	*(2,29)*	*0,16*		*(2,53)*	*(0,10)*	
E. Pembiayaan Anggaran	**522,83**	**107,27**	**20,52**	**616,19**	**154,04**	**25,00**

Selama 1 Januari s.d. 31 Januari 2025, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp88.89 triliun

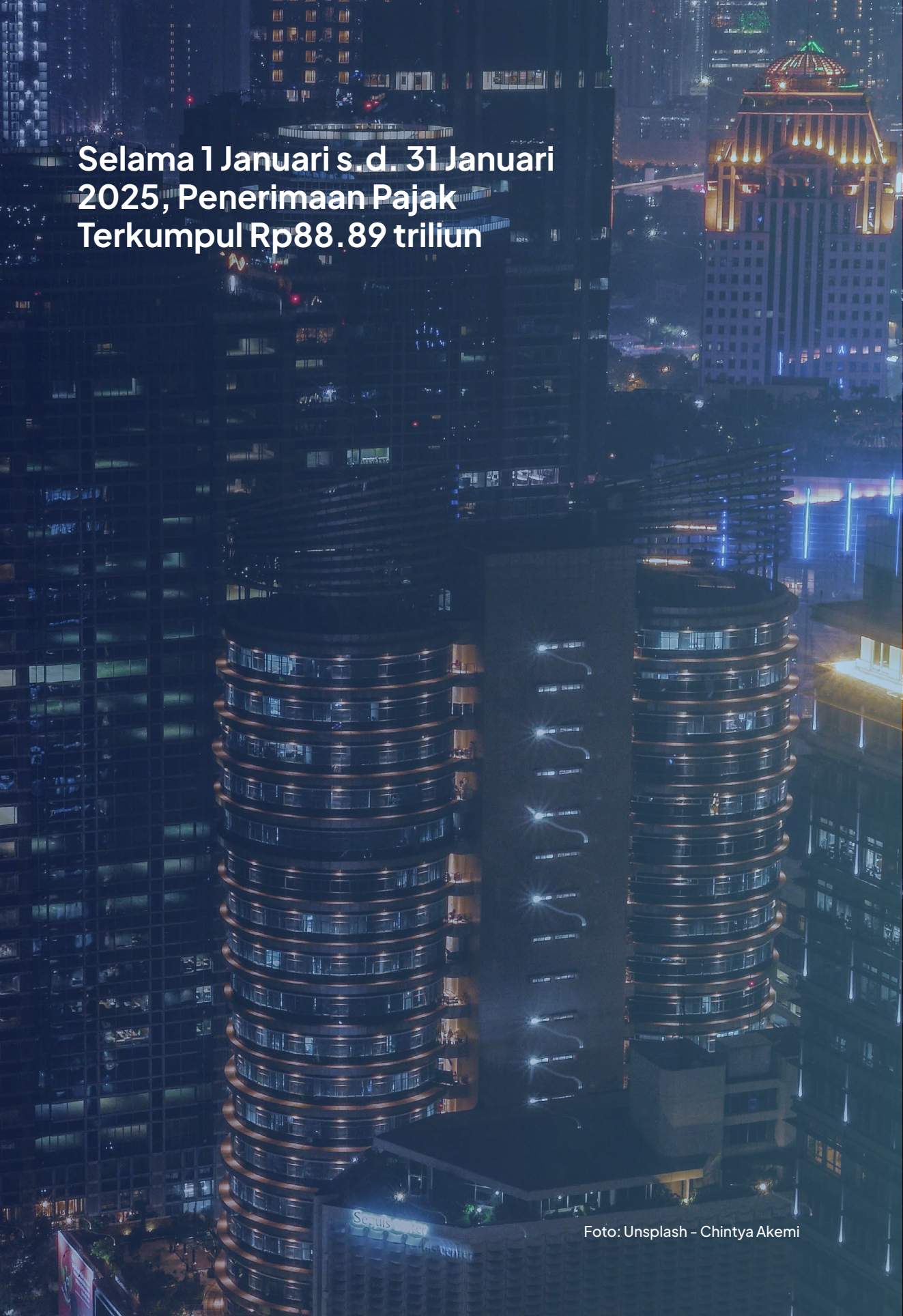

Foto: Unsplash - Chintya Akemi

Penerimaan Pajak

Pada 2025, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diberikan amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak Rp2.189,31 triliun, meningkat 13,29 persen dari realisasi sementara penerimaan pajak pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan dan strategi pajak difokuskan pada penguatan basis pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penguatan sinergi melalui *joint program*, penguatan sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi, pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur, serta penguatan organisasi dan sumber daya manusia.

Untuk mencapai target 2025, kebijakan dan strategi pajak difokuskan pada penguatan basis pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Realisasi Penerimaan Pajak 2025

Uraian	Target APBN 2025 (Triliun)	1 Januari s.d. 31 Januari 2025		
		Realisasi Neto (Triliun)	Kontribusi (%)	Capaian (%)
Pajak Penghasilan	1209,28	62,05	69,80	5,13
- Nonmigas	1146,44	57,78	65,00	5,04
- Migas	62,84	4,27	4,80	6,79
PPN & PPnBM	945,12	24,62	27,70	2,60
PBB dan Pajak Lainnya	34,91	2,22	2,50	6,37
Jumlah	**2189,31**	**88,89**	**100,00**	**4,06**

Realisasi penerimaan pajak Januari 2025 tercatat Rp88,89 triliun atau 4,06 persen dari target, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara lebih detil, sampai dengan 31 Januari 2025, PPh Nonmigas mencatat realisasi Rp57,78 triliun, atau 5,04 persen dari target. Kelompok PPN dan PPnBM terealisasi Rp24,62 triliun atau 2,60 persen dari target. Selanjutnya, PPh Migas membukukan penerimaan Rp4,27 triliun atau 6,79 persen dari target. Kinerja penerimaan ketiga kelompok pajak tersebut mengalami pelambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi PBB dan Pajak Lainnya meningkat dari tahun sebelumnya sebagai akibat ketentuan baru terkait deposit pajak. PBB dan Pajak Lainnya terealisasi Rp2,22 triliun atau 6,37 persen dari target.

Berdasarkan jenis pajak, sumber penerimaan pajak terbesar pada Januari 2025 yaitu PPN Impor, PPh Pasal 21, dan PPh Final. Realisasi PPN Impor tercatat Rp20,21 triliun atau berkontribusi 22,74 persen terhadap total penerimaan pajak. Terjadi peningkatan setoran pajak atas impor bahan baku terutama pada industri makanan. Selanjutnya, sebagai kontributor terbesar kedua, PPh Pasal 21 membukukan realisasi Rp15,95 triliun atau 17,94 persen terhadap total penerimaan pajak. Kinerja PPh Pasal 21 tidak terlepas dari dampak implementasi skema tarif efektif rata-rata (TER). PPh Final dengan realisasi Rp11,57 triliun atau 13,01 persen dari total penerimaan pajak, ditopang oleh setoran pajak atas bunga deposito atau tabungan, bunga atau diskonto obligasi, serta persewaan atas tanah dan/atau bangunan.

Terjadi pergesaran posisi kontributor terbesar pada periode ini akibat pelambatan kinerja penerimaan PPN Dalam Negeri dan PPh Badan. Hingga akhir Januari 2025, realisasi PPh Badan mencapai Rp4,16 triliun, sedangkan PPN Dalam Negeri tercatat Rp2,58 triliun.

Dari sisi sektor usaha, tiga sektor penyumbang penerimaan terbesar bersumber dari sektor Industri Pengolahan, sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan sektor Pertambangan

Realisasi Penerimaan Per Jenis Pajak dan Sektor

Jenis Pajak	Realisasi & Kontribusi
PPN Impor	Rp 20,21 T
	22,74 %
PPh 21	Rp 15,95 T
	17,94 %
PPh Final	Rp 11,57 T
	13,01 %
PPh 26	Rp 8,94 T
	10,06 %
PPh 22 Impor	Rp 6,09 T
	6,85 %
PPh Badan	Rp 4,16 T
	4,68 %
PPN DN	Rp 2,58 T
	2,90 %
PPh OP	Rp 0,46 T
	0,52 %

Sektor Usaha	Realisasi & Kontribusi
Industri Pengolahan	Rp 23,25 T
	25,9 %
Keuangan & Asuransi	Rp 13,62 T
	15,2 %
Pertambangan	Rp 10,18 T
	11,3 %
Konstruksi & Real Estat	Rp 8,40 T
	9,4 %
Transportasi & Pergudangan	Rp 6,71 T
	7,5 %
Jasa Perusahaan	Rp 5,76 T
	6,4 %
Perdagangan	Rp 4,23 T
	4,7 %
Informasi & Komunikasi	Rp 4,05 T
	4,5 %

dan Penggalian. Ketiga sektor tersebut menyumbang hingga 52,4 persen terhadap total penerimaan pajak Januari 2025. Lebih detil, realisasi penerimaan pajak dari sektor Industri Pengolahan terkumpul Rp23,25 triliun, sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi Rp13,62 triliun, dan sektor Pertambangan Rp10,18 triliun.

Surplus Neraca Perdagangan Nasional Januari 2025 Mencapai USD3,45 Miliar

Foto: Kemenkeu - Ardo Hadyan

Penerimaan Kepabeanan & Cukai

Awal 2025 dibuka dengan kinerja positif pada neraca perdagangan, dengan surplus tercatat USD3,45 miliar pada Januari 2025. Capaian ini menandai keberlanjutan tren surplus sejak Mei 2020, atau selama 57 bulan berturut-turut. Surplus ini berperan penting dalam menjaga cadangan devisa negara serta memperkuat persepsi positif global terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, konsistensi surplus turut meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian pasar internasional.

Surplus neraca perdagangan terutama terjadi pada Nonmigas, sedangkan Migas masih defisit. Kinerja positif neraca Nonmigas didukung oleh

Surplus ini berperan penting dalam menjaga cadangan devisa negara serta memperkuat persepsi positif global terhadap perekonomian Indonesia.

Grafik Neraca Perdagangan Indonesia 2023–2025

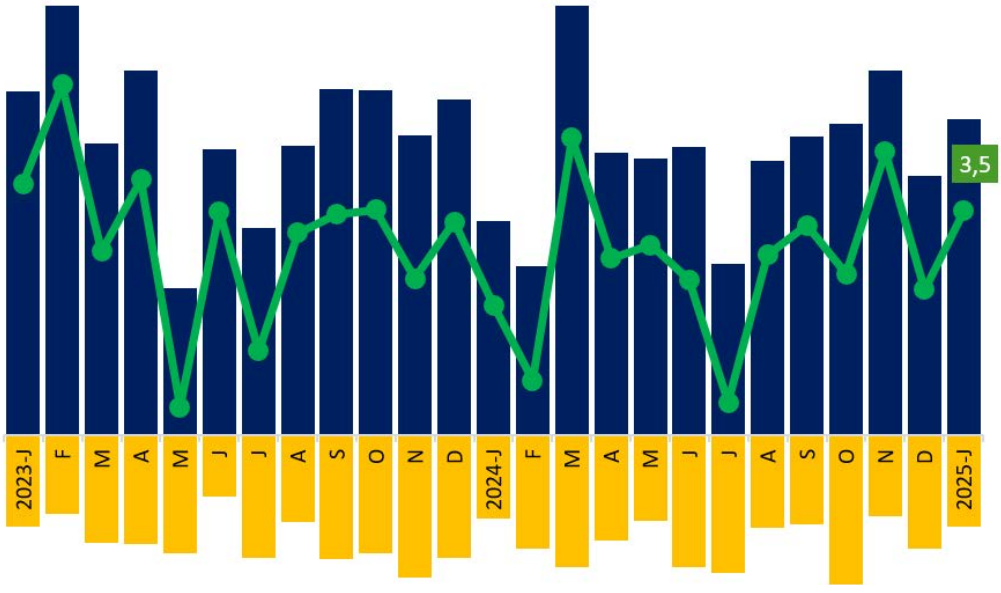

Realiasasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2024	2025	2024	2025	
1	BEA MASUK	52,94	3,86	3,87	-5,70%	0,23%	7,31%
2	CUKAI	244,20	17,89	19,97	-5,13%	11,63%	8,18%
	Hasil Tembakau	230,09	17,38	19,43	-5,60%	11,84%	8,45%
	Ethil Alkohol	0,12	0,01	0,01215	18,07%	-6,04%	10,25%
	MMEA	10,19	0,49	0,50	12,77%	1,83%	4,90%
	Denda Adm. Cukai	-	0,01	0,02	182,92%	168,39%	-
	Cukai Lainnya	-	0,00	0,00	57,31%	-19,99%	-
	MBDK	3,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	4,47	1,16	2,45	0,59%	111,00%	54,88%
	TOTAL	301,60	22,91	26,29	-4,95%	14,75%	8,72%
	PPN Impor		19,56	20,21	0,22%	3,35%	
	PPNBM Impor		0,17	0,22	-18,53%	27,42%	
	PPh Pasal 22 Impor		6,31	6,09	3,84%	-3,50%	
	Total PDRI lainnya		26,04	26,52	0,93%	1,85%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		48,95	52,81	-1,91%	7,89%	

Sumber: DJPB 5 Februari 2025

komoditas SDA seperti batubara dan produk kelapa sawit. Selain itu, sektor manufaktur logam dasar non besi dan kimia dasar organik juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan surplus tersebut. Di sisi lain, neraca perdagangan sektor Migas masih defisit, terutama disebabkan oleh impor bahan bakar dan minyak bumi.

Pada Januari 2025, total ekspor mencapai USD21,45 miliar, terutama didorong oleh kinerja sektor Nonmigas. Ekspor Nonmigas membaik sejalan dengan tinggiya ekspor logam dasar dan barang kimia dasar. Sedangkan, kinerja ekspor sektor Migas lebih dipengaruhi oleh volume ekspor gas alam tujuan Tiongkok dan minyak bakar ke Malaysia yang realisasinya masih belum signifikan.

Sementara itu, impor mencapai USD18,00 miliar, dipengaruhi oleh kinerja sektor Nonmigas maupun Migas. Sektor tersebut didominasi oleh impor peralatan komunikasi dan produk baja. Impor migas karena penurunan impor solar dan minyak bumi.

Hingga 31 Januari 2025, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp26,29 triliun atau 8,72 persen dari target, didorong kinerja semua komponen penerimaan terutama bea keluar. Sementara itu, Penerimaan PDRI lainnya mencapai Rp26,52 triliun atau Dengan demikian, Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabeanan dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp52,81 triliun.

Dari sisi BM, kinerja penerimaan mencapai Rp3,87 triliun atau mencapai 7,31 persen dari target. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh depresiasi rupiah terhadap USD di saat kinerja impor terkontraksi. Dilihat dari komoditasnya, penerimaan BM terutama berasal

Dari sisi BM, kinerja penerimaan mencapai Rp3,87 triliun atau mencapai 7,31 persen dari target. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh depresiasi rupiah terhadap USD di saat kinerja impor terkontraksi.

impor gas, gula pasir, suku cadang kendaraan bermotor, kosmetik, dan bahan baku plastik. Importasi barang-barang tersebut tersebut mengindikasikan pertumbuhan aktivitas industri di dalam negeri.

Penerimaan BK tercatat Rp2,45 triliun, mencapai 54,88 persen dari. Peningkatan didominasi BK produk kelapa sawit dan biji kakao. BK produk kelapa sawit mendominasi dipengaruhi oleh tren harga CPO yang masih tinggi mencapai USD 1.060/MT pada Januari 2025. Sedangkan penerimaan BK biji kakao juga berkontribusi, dipengaruhi oleh kenaikan Harga Patokan Ekspor, pada bulan Januari 2025 mencapai USD 10.060 /MT.

Cukai, mesin utama Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan penerimaan terbesar, mencapai Rp19,97 triliun atau 8,18 persen dari target. Kinerja

Penerimaan Cukai MMEA terealisasi Rp0,50 triliun, atau mencapai 4,90 persen dari target. Kinerja ini didorong oleh produksi MMEA dalam negeri pada Golongan B dan C, meskipun produksi Golongan A menurun.

tersebut berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT), dan Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA), sedangkan Ethil Alkohol (EA) turun.

Penerimaan CHT sebesar Rp19,43 triliun, atau mencapai 8,45 persen dari target. Kinerja CHT pada Januari 2025 dipengaruhi oleh produksi dan tarif November 2024, seiring dengan pemanfaatan fasilitas penundaan pelunasan selama dua bulan. Selain itu, penerimaan juga meningkat akibat pelunasan maju, pembayaran yang seharusnya jatuh tempo pada 1–2 Februari 2025 dilunasi lebih awal pada Januari 2025 karena hari libur.

Penerimaan Cukai MMEA terealisasi Rp0,50 triliun, atau mencapai 4,90 persen dari target. Kinerja ini didorong oleh produksi MMEA dalam negeri pada Golongan B dan C, meskipun produksi Golongan A menurun. Golongan A mencakup minuman dengan kadar alkohol di bawah 5 persen, Golongan B berkisar antara 5 persen hingga 20 persen, sedangkan Golongan C memiliki kadar alkohol di atas 20 persen. Produksi MMEA secara keseluruhan tetap terkendali, dengan total produksi turun 6,3 persen, terutama akibat penurunan produksi Golongan A dengan tarif rendah dikompensasi oleh kenaikan produksi Golongan B dan C dengan tarif lebih tinggi.

Sementara itu, kinerja penerimaan Cukai EA sebesar Rp12,15 miliar, atau mencapai 10,25 persen dari target. Capaian ini dipengaruhi oleh produksi EA bayar, atau produksi yangdibebani cukai. Secara umum, nilai penerimaan EA relatif kecil karena sebagian besar produk EA tidak dikenakan cukai atau mendapatkan pembebasan, baik untuk keperluan medis, industri, maupun fasilitas lainnya.

Halaman Ini Dikosongkan

Pendapatan KND Menjadi Lokomotif Kontributor PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Awal 2025 ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pemulihan permintaan global (pascaresesi 2024) mendorong kenaikan harga minyak mentah. Namun, harga batubara masih tertekan dampak transisi energi ke sumber terbarukan serta penurunan permintaan dari Tiongkok dan India. Kondisi perekonomian dalam negeri 2024 yang membaik telah menyumbang peningkatan setoran dividen yang diterima perbankan.

Realisasi PNBP hingga Januari 2025 tercatat Rp42,13 triliun atau 8,20 persen dari target. Capaian ini dipengaruhi oleh dampak penurunan fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan batubara yang masih berlanjut di pasar internasional serta volume produksi batubara dalam negeri yang berkurang.

Kondisi perekonomian dalam negeri 2024 yang membaik telah menyumbang peningkatan setoran dividen yang diterima perbankan.

Realisasi PNBP s.d. 31 Januari 2025

PNBP (Triliun Rupiah)	APBN 2025	s.d. 31 Januari 2024			s.d. 31 Januari 2025		
		Real s.d. 31 Jan	% thd APBN	Growth (%)	Real s.d. 31 Jan	% thd APBN	Growth (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**513,64**	**43,45**	**8,83%**	**(4,98%)**	**42,13**	**8,20%**	**(3,05%)**
A Pendapatan SDA	**217,96**	**18,96**	**9,13%**	**(27,71%)**	**16,98**	**7,79%**	**(10,43%)**
Migas	**120,99**	**9,53**	**8,65%**	**(18,04%)**	**8,37**	**6,92%**	**(12,23%)**
a Minyak Bumi	89,03	9,53	11,84%	(18,04%)	8,37	9,40%	(12,23%)
b Gas Bumi	31,96	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Nonmigas	**96,97**	**9,43**	**9,67%**	**(35,41%)**	**8,62**	**8,89%**	**(8,61%)**
a Pendapatan Pertambangan Minerba	87,48	8,80	10,25%	(38,28%)	8,03	9,18%	(8,76%)
b Pendapatan Kehutanan	5,67	0,52	8,66%	69,12%	0,48	8,46%	(7,61%)
c Pendapatan Kelautan & Perikanan	1,63	0,08	2,41%	4808,82%	0,08	4,81%	(7,15%)
d Pendapatan Panas Bumi	2,19	0,03	1,22%	(18,46%)	0,03	1,42%	17,07%
B Pendapatan KND	**90,00**	**6,77**	**7,89%**	**47,37%**	**10,88**	**12,09%**	**60,71%**
a Laba BUMN Perbankan	48,87	6,77	14,51%	47,37%	10,88	22,27%	60,71%
b. Laba BUMN Nonperbankan	41,13	0,00	0,00%	19,88%	-	0,00%	(100,00%)
C Pendapatan PNBP Lainnya	**127,74**	**16,04**	**13,93%**	**10,53%**	**13,03**	**10,20%**	**(18,75%)**
a. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	37,23	3,13	11,28%	(11,53%)	2,74	7,36%	(12,30%)
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	4,47	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
c. Pendapatan PNBP K/L	86,05	12,92	16,02%	17,63%	10,29	11,96%	(20,32%)
D Pendapatan BLU	**77,93**	**1,68**	**2,02%**	**322,53%**	**1,23**	**1,58%**	**(26,80%)**
a BLU Kepala Sawit	13,27	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
b BLU Non Kelapa Sawit	64,66	1,68	3,03%	322,53%	1,23	1,90%	(26,80%)

Pendapatan SDA Migas mencapai Rp8,37 triliun, 6,92 persen dari target. Realisasi ini dipengaruhi oleh penurunan ICP dan *lifting* gas bumi. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan penurunan SDA adalah proforma *lifting* yang terealisasi di Desember 2024 dan kenaikan *cost recovery*.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp8,62 triliun, 8,89 persen dari target yang dipengaruhi oleh pelambatan kinerja sektor Minerba, sektor Kehutanan, serta sektor Perikanan.

Pendapatan sektor Minerba mencapai Rp8,03 triliun, 9,18 persen dari target. Capaian ini dipengaruhi oleh dampak fluktuasi HBA dan volume produksi batubara serta beberapa jenis minerba di pasaran.

Pendapatan sektor Kehutanan mencapai Rp0,48 triliun, 8,46 persen dari target. Capaian PNBP SDA Kehutanan disebabkan oleh pembayaran Dana Reboisasi (DR) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Sementara itu, realisasi Pendapatan sektor Kelautan dan Perikanan khususnya dari Perikanan mencapai Rp0,08 triliun, 4,81 persen dari target yang dipengaruhi oleh Pendapatan Hasil perikanan selama masa liburan Natal, Tahun Baru dan Imlek, serta pengaruh cuaca yang tidak mendukung penangkapan ikan di laut.

Selanjutnya, capaian Pendapatan sektor Panas Bumi tercatat Rp0,03 triliun, 1,42 persen dari target yang disumbang oleh kewajiban Iuran Tetap Panas Bumi 2025 yang dibayarkan PT PLN tepat waktu pada Januari 2025 (pembayaran kewajiban untuk 2024 telah disetor pada Desember 2023).

Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp10,88 triliun, 12,09 persen dari target. Capaian ini berasal dari pembayaran dividen Perbankan, yaitu dividen interim BRI untuk tahun buku

Realisasi Pendapatan KND Periode Januari 2022–2025

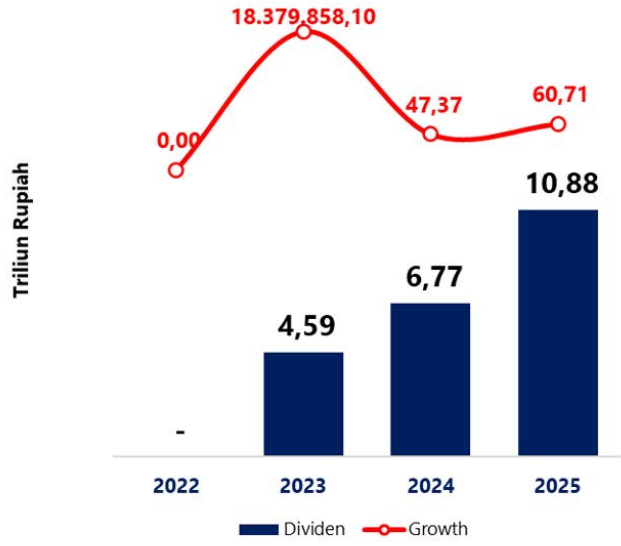

2024. Dalam tiga tahun terakhir, BRI rutin membagikan dividen interim.

Capaian realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp13,03 triliun, 10,20 persen dari target yang disumbang oleh Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Pendapatan PNBP K/L.

Realisasi Pendapatan PHT mencapai Rp2,74 triliun, 7,36 persen dari target yang disebabkan oleh moderasi HBA. Rata-rata HBA (utama) Januari 2025.

Pendapatan PNBP K/L mencapai Rp10,29 triliun, 11,96 persen dari target yang dipengaruhi oleh pendapatan Premium Obligasi Negara dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu.

Realisasi Pendapatan BLU mencapai Rp1,23 triliun, 1,58 persen dari target yang dipengaruhi oleh penerapan kebijakan pemisahan K/L. Kebijakan ini menyebabkan perubahan kode satker dan rekening, sementara proses penyelesaian dua hal tersebut membutuhkan waktu sehingga menyebabkan pengesahan PNBP BLU pada Januari 2025 tertunda.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Terutama untuk untuk Pemberian Bantuan kepada Masyarakat, Dukungan Persiapan Pelaksanaan Pemilu, serta Pemenuhan Kewajiban Pemerintah.

Foto: Storypost - Ahmad Sahlul

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mencapai Rp86,04 triliun atau 3,2 persen dari pagu. Realisasi BPP tersebut dimanfaatkan antara lain untuk menjaga kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, realisasi BPP juga dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri.

BELANJA K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp24,38 triliun atau 2,1 persen dari target. Belanja K/L dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran PBI JKN, Program Makan Gergizi Gratis, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri.

Realisasi BPP sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mencapai Rp86,04 triliun atau 3,2 psersen dari pagu.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. 31 Januari 2025 (dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd Januari	% thd APBN
Belanja K/L	1.160,09	24,38	2,10
Belanja Pegawai	305,94	16,86	5,51
Belanja Barang	484,98	3,22	0,66
Belanja Modal	234,11	0,17	0,07
Bantuan Sosial	135,06	4,13	3,06
Belanja Non-K/L	1.541,36	61,66	4,00
a.l Belanja Pegawai	215,51	24,59	11,41
Subsidi	307,93	2,91	0,94
Total	**2.701,44**	**86,04**	**3,19**

Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp16,86 triliun (5,51 persen dari APBN 2025). Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan Rp11,29 triliun dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya Rp5,6 triliun. Realisasi tersebut dipengaruhi antara lain pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kemenag.

Belanja Barang K/L sudah terealisasi Rp3,22 triliun atau 0,66 persen dari pagu. Secara rinci, realisasi anggaran Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk : (1) modernisasi almatsus dan sarpras Polri; (2) penggunaan kekuatan Kemenhan; (3) pelayanan kesehatan UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes; (4) komunikasi publik anggota Legislatif; (5) pemeliharaan keamanan & ketertiban masyarakat; (6) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan (7) penyediaan dan penyaluran makan bergizi.

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp172,55 miliar atau 0,07 persen dari pagu. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pengadaan sarpras non alutsista TNI dan peningkatan rumah dinas matra udara oleh Kementerian Pertahanan; (2) sarana konektivitas transportasi darat, laut, dan udara oleh Kementerian Perhubungan; serta (3) prasarana pendidikan dasar dan menengah oleh Kementerian Agama.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp4,13 triliun, 3,06 persen dari pagu. Sampai dengan akhir Januari 2025, realisasi belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (2) penyaluran bantuan KIP Kuliah melalui Kemenag; (3) pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) serta bantuan permakanan bagi yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp61,66 triliun, 4,0 persen dari pagu. Realisasi Belanja Non-K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran subsidi dan pembayaran manfaat pensiun.

Realisasi Belanja Pegawai Non-K/L mencapai Rp 24,59 triliun atau 11,41 persen dari target. Realisasi tersebut, terutama dipengaruhi oleh pembayaran Manfaat Pensiun reguler kepada pensiunan ASN/TNI/Polri.

Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp2,91 triliun atau 0,94 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi Rp2,86 triliun, mencakup Subsidi BBM Rp0,83 triliun dan Subsidi Listrik Rp2,02 triliun; dan (b) Subsidi Non Energi Rp53,1 miliar, terutama untuk Subsidi Bunga Kredit Program. Realisasi subsidi energi tersebut untuk pembayaran kurang bayar subsidi energi. Realisasi Subsidi Non Energi terutama dimanfaatkan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 156,2 ribu debitur dan penyaluran pupuk bersubsidi 630,8 ribu ton.

Penyaluran TKD Telah Terealisasi Rp94,73 Triliun atau 10,30 Persen dari Pagu

Foto: Kemenkeu - Resha Aditya

Transfer ke Daerah

Di awal 2025 ini, realisasi TKD sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp 94,73 triliun atau 10,30 persen dari pagu. Realisasi TKD berasal dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dan Dana Desa. Sebagian dana TKD yang belum disalurkan karena masih menunggu penyampaian syarat salur dan/atau belum masuk jadwal penyaluran. Sebagai tambahan informasi, sesuai dengan Instruksi Persiden Nomor 1/2025, terdapat penyesuaian alokasi TKD yang diatur dalam KMK Nomor 29/2025.

DANA BAGI HASIL

PPada Januari 2025, penyaluran DBH mencapai Rp82,1 miliar atau 4,27 persen dari pagu. Terdapat perubahan regulasi, PMK Nomor 67/2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU, dimana dari semula penyaluran DBH dilakukan secara triwulanan diubah menjadi penyaluran secara bulanan. Selain itu, terdapat tambahan syarat salur untuk jenis DBH Tambahan Migas Otsus dan belum ada pemda yang menyampaikan syarat salur tersebut sehingga penyaluran Januari untuk DBH Tambahan Migas Otsus belum disalurkan.

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU pada 31 Januari 2025 mencapai Rp57,78 miliar atau 12,94 persen dari pagu. Terdapat perbaikan tingkat kepatuhan penyampaian syarat salur oleh pemerintah daerah dalam penyaluran DAU yang tidak ditentukan

Realisasi TKD T.A. 2024 & 2025 Tanggal: 1 – 31 Januari 2025 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2025		
	APBN	Realisasi	% thd APBN	APBN	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah	**857.591,74**	**87.777,40**	**10,24**	**919.872,10**	**94.730,30**	**10,30**
Dana Bagi Hasil	**143.099,93**	**13.186,90**	**9,22**	**192.281,70**	**8.210,20**	**4,27**
Dana Alokasi Umum	**427.699,30**	**45.150,90**	**10,56**	**446.633,80**	**57.784,40**	**12,94**
Dana Alokasi Khusus	**188.101,01**	**27.528,90**	**14,64**	**185.241,00**	**27.771,70**	**14,99**
1. DAK Fisik	53.822,46	0	0,00	36.954,00	0	**0,00**
2. DAK Nonfisik	133.764,61	27.528,90	20,58	146.677,90	27.771,70	**18,93**
3. Hibah ke Daerah	513,94	0	0,00	1.609,00	0	**0,00**
Dana Otonomi Khusus	**18.271,49**	**0**	**0,00**	**17.515,60**	**0**	**0,00**
Dana Keistimewaan DIY	**1.420,00**	**0**	**0,00**	**1.200,00**	**0**	**0,00**
Dana Desa	**71.000,00**	**1.910,70**	**2,69**	**71.000,00**	**964**	**1,36**
Insentif Fiskal	**8.000,00**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**	**0,00**

penggunaannya (DAU *blockgrant*).

Dana Transfer Khusus

Realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus pada Januari 2025, berasal dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Hal ini dikarenakan penyaluran DAK Fisik dilakukan paling cepat pada Februari, setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan DAK Fisik 2025, telah dilakukan penyelesaian penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Pemda bersama K/L teknis pada akhir Desember 2024. Rencana Kegiatan yang telah disusun, dapat dilakukan Revisi RK maksimal pada minggu kedua Maret 2025. Selain itu, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana terdapat alokasi DAK Fisik yang dicadangkan, yaitu mencapai 18,3 triliun dengan rincian:

1. DAK Fisik Bidang Konektivitas Rp 14,60 triliun

2. DAK Fisik Bidang Irigasi Rp 1,72 triliun

3. DAK Fisik Bidang Pangan Pertanian Rp 0,67 triliun

4. DAK Fisik Bidang Pangan Akuatik Rp 1,31 triliun

Seiring dengan pencadangan tersebut, tentunya akan berimplikasi terhadap terhambatnya pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan DAK Fisik sebagai salah satu syarat penyaluran DAK Fisik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa langkah

yang disampaikan ke pemerintah daerah berupa pemberian informasi yang tepat waktu dan transparan, serta pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah.

Pada Januari 2025, realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp27,77 miliar atau 18,93 persen dari pagu yang berasal dari penyaluran dana BOSP. Terdapat perbaikan tata kelola penyampaian data BOS di daerah dan di Kemendikbud. Penyaluran DAK Nonfisik jenis lainnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan PMK Nomor 204/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.

Sementara itu, belum terdapat realisasi untuk Hibah kepada Daerah pada Januari 2025 sama seperti periode yang sama tahun lalu. Hal ini mengingat penyaluran Hibah kepada Daerah dilakukan berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di daerah (pre-financing).

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan 31 Januari 2025, belum terdapat realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) maupun Dana Tambahan Infratsruktur (DTI) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena saat ini pemda penerima Dana Otsus masih harus menyelesaikan dokumen rencana anggaran program penggunaan (RAP) dana otsus. Walaupun sebagian daerah sudah menyelesaikan RAP pada Januari namun RAP harus dilakukan perubahan kembali sebagai akibat penyesuaian pagu dana otsus 2025 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi belanja berdasarkan Inpres Nomor 1/2025. Di samping itu, saat ini pemda juga masih menyelesaikan dokumen Laporan Tahunan pelaksanaan dana otsus TA 2024 sebagai salah satu syarat salur Tahap I.

Pada Januari 2025, realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp27,77 miliar atau 18,93 persen dari pagu yang berasal dari penyaluran dana BOSP.

Dari sisi regulasi, penyaluran dana otsus dan DTI tahap I dilakukan paling lambat April tahun anggaran berjalan, sehingga dimungkinkan untuk disalurkan sebelum April sepanjang sudah memenuhi dokumen syarat salur berupa Laporan Tahunan dan hasil validasi RAP dengan APBD.

Sementara itu, atas Dana Keistimewaan juga belum terdapat realisasi penyaluran dikarenakan sampai dengan 31 Januari 2025 belum terdapat surat permintaan penyaluran dari Pemerintah Daerah DI Yogyakarta.

DANA DESA

Pada periode ini, realisasi penyaluran Dana Desa 2025 hingga 31 Januari 2025 mencapai Rp964 miliar atau 1,36 persen dari pagu. Dari sisi komposisi, Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) tetap lebih dominan

dibandingkan yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*), baik pada Januari 2025 maupun tahun sebelumnya.

Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan penyaluran dana desa di periode ini. Dimulai dengan adanya perubahan kebijakan mengenai persyaratan penyaluran Dana Desa, yaitu adanya tambahan persyaratan penyaluran Dana Desa dalam bentuk ADK APBDesa. Selain itu, terdapat regulasi baru yang diatur dalam Kepmendes Nomor 3/2025 yang menetapkan penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan minimal 20 persen digunakan dalam bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tantangan lainnya adalah kapasitas pemerintahan desa yang masih terbatas dalam menyusun dokumen ADK APBDes secara elektronik dan kendala teknis dalam proses administrasi.

Namun demikian, seiring dengan proses penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya dalam memahami dan memenuhi persyaratan administrasi yang baru dan pelaksanaan program ketahanan pangan, tantangan dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada tahap berikutnya diharapkan dapat ditangani. Dengan meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun dokumen yang dibutuhkan serta optimalisasi sistem pencairan yang telah disiapkan, realisasi Dana Desa di bulan-bulan mendatang diharapkan dapat meningkat secara signifikan, sehingga tetap dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa..

INSENTIF FISKAL

Pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2025, pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Fiskal (IF) Rp6,00 triliun. Dana Insentif Fiskal ditujukan untuk dapat memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik dan juga dapat memacu daerah lainnya untuk melakukan percepatan capaian kinerja. Alokasi Dana IF ini terdiri atas alokasi Dana IF kinerja tahun sebelumnya Rp4,00 triliun dan alokasi Dana IF tahun berjalan Rp2,00 triliun.

Mekanisme penyaluran Dana IF sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 91/2024 dokumen syarat salur adalah Peraturan Daerah APBD TA 2025, laporan realisasi IF 2024 (bagi yang mendapatkan), dan laporan rencana penggunaan IF 2025. Sampai dengan 31 Januari 2025 belum terdapat penyaluran Dana IF, dikarenakan belum terdapat pemerintah daerah yang memenuhi syarat salur dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya tahap I.

Halaman Ini Dikosongkan

Pembiayaan Utang Dalam Batas Aman dan *Managable* Mendukung Konsolidasi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Foto: Kemenkeu - Resha Aditya

Pembiayaan Utang

Memasuki awal tahun 2025, ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Dalam menghadapi dinamika ini, kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical* menjadi sangat penting untuk mendukung peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi, sehingga dapat tetap melindungi kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen mengelola defisit secara *prudent* melalui strategi pembiayaan yang aman, terkendali, dan berkelanjutan

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjalankan kebijakan defisit yang *prudent* ini melalui bauran pembiayaan utang yang aman dan manageable, serta pembiayaan nonutang yang optimal dan produktif. Kebijakan ini dirancang tidak hanya sebagai respons terhadap fluktuasi ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Defisit APBN 2025 ditetapkan 2,53 persen terhadap PDB, sejalan dengan arah dan strategi kebijakan fiskal 2025 yang mendorong reformasi struktural dalam rangka transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga akhir Januari 2025, defisit tetap terkendali dengan realisasi mencapai Rp23,5 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB.

Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan strategi oportunistik yang terukur. Pada Januari

Pembiayaan Utang

***Data per 31 Januari 2025**

"Pembiayaan dikelola secara *prudent* dan *sustainable* untuk mendukung agenda pembangunan, defisit dan rasio utang terkendali dalam batas aman

Realisasi **Pembiayaan Utang** *dalam triliun Rupiah	s.d 31Januari 2025 Rp **153,36**
Surat Berharga Negara (Neto)	Rp 160,87
Pinjaman (Neto)	Rp (7,52)

Pengadaan utang melalui SBN sepanjang bulan Januari 2025 dilakukan melalui 4x lelang reguler dengan mencatatkan *bid to cover ratio* sebesar 1,67 kali. Sebagai strategi mitigasi terhadap potensi *crowding out effect* di pasar domestik, Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan SUN Valas (Global Bond) sebesar USD2 miliar dengan tenor 5 dan 10 tahun serta EUR1,4 miliar dengan tenor 8 dan 12 tahun.

Kinerja Lelang SBN
Januari 2025

Rata-rata penawaran yang masuk tiap lelang
Rp **30,18** triliun

Rata-rata nominal dimenangkan tiap lelang
Rp **18,05** triliun

Global Bond
Januari 2025

EUR **1,4 miliar**
tenor 8 dan 12 tahun

USD **2 miliar**
tenor 5 dan 10 tahun

Pada Januari 2025, Pemerintah menandatangani perjanjian pinjaman dengan JICA untuk mendukung **Patimban Port Development Project (III)**. Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi logistik dan mempercepat konektivitas antara pusat industri Jakarta dan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

2025, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp153,36 triliun, terdiri atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) (neto) Rp160,87 triliun dan Pinjaman (neto) negatif Rp7,52 triliun. Pemerintah terus memprioritaskan penerbitan SBN domestik guna mengendalikan risiko dan memperkuat ketahanan pasar keuangan nasional.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya utang, Pemerintah terus mendorong perwujudan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid dengan memastikan mekanisme lelang yang transparan dan kompetitif. Selama Januari 2025, telah dilaksanakan empat lelang SBN yang terdiri atas dua lelang Surat Utang Negara (SUN) dan dua lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan *bid-to-cover ratio* 1,67×. Rata-rata penawaran yang masuk mencapai Rp30,18 triliun per lelang, dengan rata-rata penawaran yang dimenangkan sebesar Rp18,05 triliun per lelang. Selain itu, pengembangan dan pendalaman pasar SBN domestik juga terus dilakukan dengan penerbitan SBN Ritel untuk meningkatkan partisipasi investor individual domestik, salah satunya melalui penerbitan ORI027T3 dan ORI027T6 yang ditawarkan mulai 27 Januari hingga 20 Februari 2025.

Selanjutnya, sebagai strategi mitigasi terhadap potensi *crowding out effect* di pasar domestik, Pemerintah juga melakukan penerbitan SUN Valas (*Global Bond*) di pasar internasional. Pada awal Januari 2025, penerbitan ini berhasil mengamankan pembiayaan sebesar USD2 miliar dengan tenor 5 dan 10 tahun serta EUR1,4 miliar dengan tenor 8 dan 12 tahun. Penerbitan SBN di pasar global dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dengan tetap memperhatikan *cost of fund* yang optimal. Strategi oportunistik pada penerbitan ini bertujuan mengoptimalkan peluang likuiditas di awal tahun dengan tetap memperhatikan dinamika pasar global dan prospek ekonomi ke depan yang menantang. Hasilnya, penerbitan ini menarik minat investor global yang tinggi dengan total *orderbook* mencapai USD 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar. Dengan orderbook solid tersebut, Pemerintah berhasil menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor, meningkatkan efisiensi biaya utang.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal.

Dari sisi pinjaman, Pemerintah tetap mengedepankan selektivitas dan produktivitas dalam mengelola pembiayaan. Pada bulan Januari 2025, pemerintah menandatangani perjanjian pinjaman dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) untuk mendukung Patimban *Port Development Project* (III). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik pelabuhan dengan mempercepat konektivitas antara pusat industri di area metropolitan Jakarta dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

Sementara itu, ditinjau dari posisi *outstanding* utang pemerintah, jumlah utang pemerintah per akhir Januari

Komposisi Utang

***Data per 31 Januari 2025**

> Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik

Posisi Utang

Rp **8.909,13**
*dalam triliun Rupiah

Debt to GDP
DEBT **39,6%**

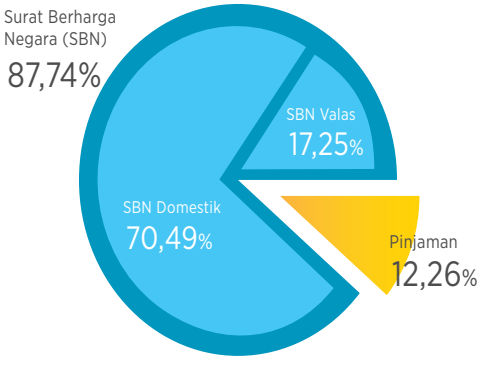

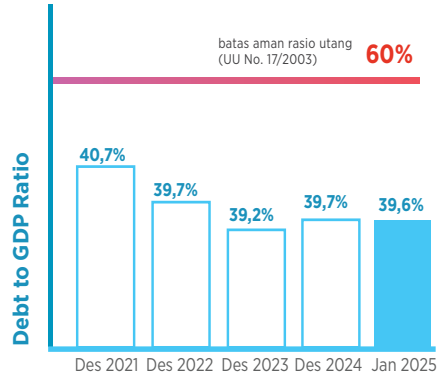

Surat Berharga Negara

Rp **7.817,23**
*dalam triliun Rupiah

• Domestik	Rp 6.280,12
Surat Utang Negara	Rp 5.049,55
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.230,57
• Valas	Rp 1.537,11
Surat Utang Negara	Rp 1.132,98
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 404,13

Pinjaman

Rp **1.091,9**
*dalam triliun Rupiah

• Pinjaman DN*	Rp 64,18
• Pinjaman LN*	Rp 1027,72
Bilateral	Rp 272,45
Multirateral	Rp 591,57
Comercial Banks	Rp 163,7
Suppliers	Rp -

2025 mencapai Rp8.909,13 triliun.

Pemerintah secara konsisten mengelola portofolio utang guna menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi. Pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, nilai tukar, likuiditas, serta jatuh tempo yang optimal agar tetap dalam batas aman dan terkendali. Rasio utang terhadap PDB pada akhir Januari 2025 mencapai 39,6 persen, konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah hingga panjang serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Hal ini tercermin dari rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity*/ATM) yang mencapai 7,88 tahun, menunjukkan profil jatuh tempo aman dan terkendali.

Risiko suku bunga dan nilai tukar tetap terkendali, dengan 80,2 persen dari total utang menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*) dan 71,2 persen dari total utang denominasi dalam Rupiah. Struktur utang ini sejalan dengan strategi pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Sementara, berdasarkan instrumen, mayoritas utang pemerintah berupa SBN yang mencapai 87,74 persen dari total utang.

Memasuki awal tahun 2025, pasar SBN bergerak dinamis dipengaruhi tekanan akibat ketidakpastian global. Namun, tekanan di pasar SBN domestik mereda menjelang akhir bulan Januari 2025, tercermin dari penurunan *yield curve* SUN dan kembalinya aliran dana asing ke dalam negeri (*net inflow*). Pasar SBN yang efisien berperan penting dalam meningkatkan ketahanan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Melalui aktivitas pembiayaan utang dengan penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Selain sebagai sumber pembiayaan, SBN juga berfungsi sebagai acuan dalam penentuan harga instrumen keuangan lainnya dan instrumen manajemen risiko bagi para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Kepemilikan SBN domestik masih didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan sebesar 85,54 persen. Sementara, kepemilikan asing terhadap SBN domestik sekitar 14,46 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Investor global cenderung wait and see terhadap dinamika pasar, termasuk kebijakan moneter US dan tensi geopolitik, serta kondisi likuiditas domestik.

Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 40,64 persen, terdiri atas perbankan (18,52 persen), perusahaan asuransi dan dana pensiun (19,05 persen), serta reksadana (3,07 persen). Bagi lembaga keuangan, SBN menjadi instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko. Sementara itu, kepemilikan Bank Indonesia sekitar 25,51 persen yang digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Kemudian, kepemilikan individu dalam SBN domestik mencapai 9,06 persen, meningkat dari kurang 3 persen pada 2019. Posisi ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong inklusi keuangan dengan meningkatkan partisipasi individu dalam kepemilikan SBN, menggeser perilaku masyarakat

dari *savings society* menjadi i*nvestment society*. Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan.

Pengakuan atas kredibilitas pengelolaan utang Pemerintah juga tercermin dari peringkat utang yang diberikan oleh lima lembaga pemeringkat utang internasional. Selama pandemi Covid-19 (2020–2023), Indonesia mampu menjaga stabilitas peringkat kreditnya, bahkan meningkat di saat sebanyak 237 negara mengalami penurunan peringkat. Berkat resiliensi perekonomian Indonesia, S&P mempertahankan outlook stabil untuk Indonesia, sementara R&I bahkan menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif.

Indonesia berhasil mempertahankan penilaian positif dari Lembaga pemeringkat kredit sepanjang tahun 2024. Hingga Desember 2024, lembaga pemeringkat global mengafirmasi bahwa kondisi ekonomi Indonesia lebih aman dibanding beberapa negara di tengah situasi yang volatile, dengan peringkat, yaitu BBB/stable (S&P), BBB/stable (Fitch), BBB+/positive (R&I), Baa2/stable (Moody's), BBB+/stable (JCR Agency). Ke depan, peringkat kredit Indonesia diperkirakan tetap stabil, bahkan diproyeksikan meningkat. Outlook positif dari R&I bahkan mengindikasikan potensi peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi A- (tiga level di atas batas minimum *investment grade*) di waktu mendatang. Proyeksi ini bergantung pada konsistensi Pemerintah dalam menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas makroekonomi mendatang.

Halaman Ini Dikosongkan

Laporan Khusus

Program Makan Bergizi Gratis, Mewujudkan SDM Sehat dan Produktif di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah mendorong transformasi ekonomi yang dilakukan salah satunya melalui penguatan kualitas SDM. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah. Program MBG merupakan salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) Presiden Prabowo yang mendukung langsung agenda Prioritas Nasional 2025 yaitu "Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas". Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program MBG akan diimplementasikan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan (PAUD hingga SMA/ sederajat), serta balita, ibu hamil dan ibu menyusui di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Pada 2025, alokasi anggaran Badan Gizi Nasional mencapai Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta orang penerima manfaat dengan rincian15,5 juta anak sekolah, dan 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita. Program MBG diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan gizi anak sekolah untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif sehingga

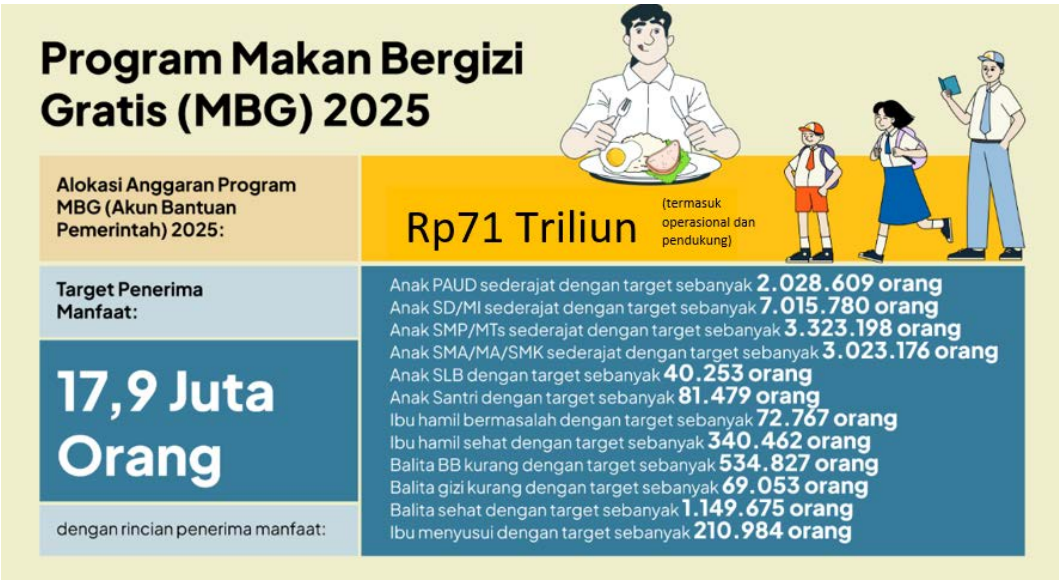
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025
Alokasi Anggaran Program MBG (Akun Bantuan Pemerintah) 2025:
Rp71 Triliun
(termasuk operasional dan pendukung)
Target Penerima Manfaat:
17,9 Juta Orang
dengan rincian penerima manfaat:
Anak PAUD sederajat dengan target sebanyak 2.028.609 orang
Anak SD/MI sederajat dengan target sebanyak 7.015.780 orang
Anak SMP/MTs sederajat dengan target sebanyak 3.323.198 orang
Anak SMA/MA/SMK sederajat dengan target sebanyak 3.023.176 orang
Anak SLB dengan target sebanyak 40.253 orang
Anak Santri dengan target sebanyak 81.479 orang
Ibu hamil bermasalah dengan target sebanyak 72.767 orang
Ibu hamil sehat dengan target sebanyak 340.462 orang
Balita BB kurang dengan target sebanyak 534.827 orang
Balita gizi kurang dengan target sebanyak 69.053 orang
Balita sehat dengan target sebanyak 1.149.675 orang
Ibu menyusui dengan target sebanyak 210.984 orang

kualitas Pendidikan turut meningkat.

Sampai dengan 8 Februari 2025, realisasi Program MBG mencapai Rp176,1 miliar, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 756.439 orang dengan rincian Pra SD (Sekolah Dasar) 42.791, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 346.040, SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) 201.758, SMA/MA (Madrasah Aliyah) 98.001, SMK/MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) 51.407, Ponpes (Pondok Pesantren) 2.675, SLB (Sekolah Luar Biasa) 1.957, Balita 7.707, Ibu Hamil 1.710, Ibu menyusui 2.393, dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak 246.

Halaman Ini Dikosongkan

Pada Selasa, 31 Desember 2024, di Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran, secara resmi merilis aplikasi Coretax DJP. Dengan peluncuran ini, sistem administrasi perpajakan di Indonesia memasuki babak baru menuju efisiensi dan digitalisasi yang lebih maju.

Coretax DJP merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini dirancang untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, serta fleksibel sesuai dengan kemajuan era digital dan perkembangan dunia bisnis.

Pembaruan sistem administrasi perpajakan ini bertumpu pada lima pilar utama, yakni organisasi, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data. Sistem ini bertujuan untuk 1) mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, yang memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien; 2) membangun sinergi yang optimal antarlembaga; 3) meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan 4) meningkatkan penerimaan negara.

Coretax DJP tidak hanya sekadar mengganti sistem lama menjadi sistem baru, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis yang signifikan, yang berfokus pada beberapa hal. Pertama, otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan. Kedua, integrasi berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti pada DJP *Online, e-Nofa*, pembayaran, *Exchange of Information*, dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut dalam Portal Wajib Pajak. Ketiga, transparansi akun wajib pajak yang memungkinkan wajib pajak dapat melihat seluruh transaksi (360–*degree view*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi wajib pajak melalui penerapan kepatuhan berbasis risiko (*Compliance Risk Management*).

Wajib Pajak dapat mengakses Coretax DJP melalui laman https://coretax.pajak.go.id. Dengan integrasi seluruh layanan administrasi perpajakan dalam satu aplikasi, kini wajib pajak cukup mengakses satu laman untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti proses bisnis yang penting bagi wajib pajak, pendaftaran atau registrasi, pembayaran, pelaporan, *taxpayer account management* (TAM), dan edukasi perpajakan.

Pemantauan Permohonan Secara Transparan

Wajib pajak kini dapat dengan mudah menelusuri dan memantau setiap tahap permohonan yang terkait dengan administrasi perpajakan. Sebagai contoh, permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Bebas (SKB) dapat dipantau melalui akun wajib pajak, sehingga mereka bisa mengetahui sejauh mana proses penyelesaian permohonan tersebut.

Hal ini tentunya dapat menekan biaya kepatuhan perpajakan (*compliance cost*). Wajib pajak tidak perlu terlalu sering mengunjungi kantor pajak. Wajib pajak juga tidak perlu menemui petugas pajak dalam proses layanan administrasi perpajakan, karena dapat dilakukan secara daring.

Sebagian besar layanan administratif perpajakan di Coretax DJP diproses secara otomatis oleh sistem. Namun, beberapa layanan melalui proses *back office* oleh pegawai pajak. Setiap *output* atau produk

hukum yang dihasilkan dari permohonan wajib pajak akan dikirim melalui email atau disematkan di akun wajib pajak.

Fitur Deposit Pajak: Solusi Pembayaran Pajak Yang Lebih Mudah

Fitur terbaru dari proses bisnis pembayaran yaitu penyediaan Deposit Pajak. Pada dasarnya, Deposit Pajak merupakan saldo yang dapat di-*top-up* sebagaimana e-*wallet*. Fitur ini tentunya dapat memudahkan wajib pajak dengan menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, wajib pajak dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pembayaran atau penyetoran pajak. Tidak perlu khawatir akan kesalahan yang terjadi pada kode pembayaran sehingga permohonan pemindahbukuan pun dapat diminimalkan. Kedua, wajib pajak dapat menghindari sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan tanggal pembayaran yang diacu adalah tanggal saat pengisian deposit. Ketiga, Deposit Pajak memberikan fleksibilitas pembayaran. Saldo deposit dapat dialihkan ke pembayaran untuk jenis pajak dan masa pajak manapun sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, jika timbul kewajiban pembayaran, Deposit Pajak dapat dimanfaatkan untuk "dipindahbukukan" ke jenis pajak dan masa pajak yang dikehendaki.

Masa Transisi ke Coretax DJP

Perlu kita perhatikan bahwa Coretax DJP digunakan mulai masa pajak Januari 2025 dan/atau tahun pajak 2025. Dengan demikian, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk dan tahun pajak 2024 dan sebelumnya, beserta masa-masa pajaknya, tetap menggunakan aplikasi lama (aplikasi *legacy*). Sebagai contoh, pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2024 yang jatuh tempo pada 31 Maret 2025 bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 bagi wajib pajak badan, masih dilakukan melalui DJP Online di laman https://djponline.pajak.go.id.

Lapor Pajak Hari Ini: Lebih Awal Lebih Nyaman

Bulan pertama 2025 telah berlalu, dan kini kita menapaki Februari dengan tetap menyongsong semangat demi mencapai kinerja yang semakin baik. Awal tahun hingga akhir Maret nanti merupakan momen penting bagi para wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Sementara itu, wajib pajak badan masih memiliki waktu hingga akhir April untuk melaporkan SPT Tahunan PPh mereka.

Melaporkan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan yang sangat penting. Hal ini lantaran sistem administrasi perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*. Dalam sistem *self-assessment* ini, negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, memotong/memungut, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri tanpa harus menunggu ketetapan dari fiskus. Kepercayaan ini mencerminkan prinsip bahwa negara menghormati hak dan kewajiban perpajakan setiap warganya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas.

Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh kita juga perlu mencantumkan harta, utang, serta susunan anggota keluarga. Tidak perlu khawatir, melaporkan harta bukan berarti harta tersebut otomatis dikenakan pajak. Data ini berfungsi sebagai informasi perpajakan dan pembanding penghasilan. Lagipula,

beberapa jenis harta bahkan bukan merupakan objek pajak, seperti harta yang diperoleh dari bantuan, sumbangan, hibah, dan warisan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pelaporan ini harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Pelaporan yang benar bermakna benar dalam penghitungan, penulisan, dan penerapan ketentuan perpajakannya. Lengkap artinya seluruh elemen dalam SPT diisi dengan baik. Jelas berarti asal-usul sumber objek pajak dan unsur lainnya dilaporkan secara transparan.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System* atau dikenal sebagai Coretax DJP), sebuah sistem terpadu yang akan menjadi pusat administrasi perpajakan. Coretax DJP digunakan untuk administrasi perpajakan sejak masa pajak Januari 2025 dan seterusnya melalui https://coretaxdjp.pajak.go.id. Oleh karena itu, pelaporan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2024 yang dilakukan pada 2025 ini masih menggunakan sistem lama, yaitu *e-Filing* di DJP *Online* (https://djponline.pajak.go.id). Coretax DJP baru akan digunakan pada awal 2026 untuk pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025.

Agar pelaporan SPT Tahunan PPh lebih mudah dan nyaman, sebaiknya kita segera melakukannya tanpa menunda. Beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta kata sandi (*password*) untuk mengakses DJP *Online*;

2. Verifikasi dengan menggunakan kode sekali pakai (*One Time Password*/OTP);

3. Data penghasilan beserta bukti potongnya;

4. Daftar harta, utang, dan anggota keluarga;

5. Pemilihan jenis formulir SPT Tahunan PPh yang sesuai, misalnya untuk wajib pajak orang pribadi apakah jenis formulir 1770, 1770S, atau 1770SS;

6. Penghitungan penghasilan dan PPh terutang;

7. Pengisian formulir secara benar, jelas, dan lengkap;

8. Pemeriksaan ulang data yang telah dimasukkan sebelum pengiriman SPT Tahunan PPh.

Dengan melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu, kita tidak hanya menghindari sanksi administrasi berupa denda keterlambatan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun negeri. Lapor lebih awal lebih nyaman. Lapor lebih awal lebih tenang. Lapor hari ini, melalui https://djponline.pajak.go.id.

Jika membutuhkan informasi dan panduan lebih lanjut, wajib pajak dapat melihat media sosial resmi DJP dan menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau Kantor Pajak terdekat.

Bea Cukai Lepas Ekspor Perdana 59,4 Ton Kopi ke Malaysia dan Australia

Bea Cukai Palembang mendukung pelepasan ekspor perdana 59,4 ton kopi asal Palembang ke mancanegara. Seremonial ekspor perdana ini diresmikan oleh Pj Gubernur Sumatra Selatan, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Bea Cukai Palembang, serta Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatra Selatan pada Minggu, 19 Januari 2025.

Pada ekspor perdana ini, eksportir mengirimkan 59,4 ton kopi yang berasal dari dua daerah penghasil kopi di Sumatra Selatan melalui Pelabuhan Boom Baru Palembang. Kepala Kantor Bea Cukai Palembang, Andri Waskito, menjelaskan bahwa komoditas yang diekspor terdiri atas 19,8 ton kopi berjenis arabika grade asal Semendo Muara Enim dan robusta grade 1 asal Pagaralam dengan tujuan Australia, serta 39,6 ton kopi berjenis robusta grade 4 asal Pagaralam dengan tujuan Malaysia.

Pj Gubernur Sumatra Selatan, Elen Setiadi, menyatakan bahwa dengan potensi geografis yang strategis serta produksi kopi yang melimpah, kopi asal Sumatra Selatan memiliki daya saing untuk menembus pasar internasional.

Menanggapi hal tersebut, Andri menegaskan bahwa Bea Cukai Palembang berkomitmen untuk terus mendukung para pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan ekspor ke pasar global. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ekspor ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, sehingga diperlukan penguatan sinergi di antara para pemangku kepentingan.

Kolaborasi yang kuat dan sinergi lintas sektor diharapkan dapat terus mendorong pemasaran kopi di wilayah Sumatra Selatan agar semakin maju dan membuka peluang ekspor yang lebih besar ke negara-negara lainnya.

Pelaksanaan Tugas Kemenkeu di Bidang Kepabeanan dan Cukai dalam Mendukung Asta Cita Presiden RI

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung Asta Cita Presiden RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan telah mengambil langkah nyata dalam 100 hari kerja pertama Kabinet Merah Putih dengan memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi peredaran barang ilegal, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berdaya saing.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Perak pada Rabu 5 Februari 2025, menjelaskan bahwa dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, Bea Cukai Kementerian Keuangan telah memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai guna menekan aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan pada penegakan hukum, tetapi juga dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, adil, dan berdaya saing. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan bersama.

Hasil Pengawasan Kepabeanan dan Cukai 2024

Sepanjang 2024, Bea Cukai telah melakukan 37.264 penindakan dengan lima komoditas terbanyak yang ditindak, yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA/miras), tekstil dan produk tekstil, narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), serta

elektronik. Total nilai barang bukti dari penindakan ini mencapai Rp9,6 triliun dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp4,8 triliun.

Di bidang narkotika, Bea Cukai bekerja sama dengan Polri dan BNN untuk melaksanakan 1.448 penindakan NPP, dengan mayoritas berasal dari jasa ekspedisi atau barang kiriman. Dari keseluruhan penindakan tersebut, sebanyak 7,4 ton barang bukti diamankan, yang terdiri atas ganja, sabu, tembakau sintetis, ekstasi, dan MDMB-Inaca. Jumlah barang bukti mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penindakan, yang berkontribusi pada perlindungan masyarakat serta penghematan biaya rehabilitasi yang mencapai triliunan rupiah.

Hasil Pengawasan 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih

Dalam periode Oktober 2024 hingga Januari 2025, Bea Cukai Kementerian Keuangan telah melakukan 6.187 penindakan terhadap berbagai komoditas, termasuk garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, dan miras. Perkiraan nilai barang yang ditegah mencapai Rp4,06 triliun, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp820 miliar. Dari seluruh penindakan tersebut, 2.657 kasus ditetapkan sebagai barang dikuasai negara (BDN) atau barang milik negara (BMN), 569 kasus dilimpahkan ke instansi lain, 120 kasus diselesaikan melalui ultimum remidium, dan 2.841 kasus masih dalam proses penelitian atau penyidikan.

Wilayah penindakan kepabeanan dan cukai meliputi pelabuhan (49 persen), bandar udara (15 persen), pesisir (10 persen), serta tempat lain seperti jalan raya dan kawasan berikat (16 persen). Komoditas terbanyak yang diamankan dalam penindakan impor meliputi rokok, miras, tekstil, elektronik, dan kosmetik, sementara untuk penindakan ekspor terdiri dari baby lobster, pasir timah, dan rotan.

Bea Cukai Kementerian Keuangan menerapkan empat strategi utama dalam pengawasan kepabeanan dan cukai, yakni penguatan pelayanan dan pengawasan, peningkatan operasi, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta optimalisasi pemindai kontainer di pelabuhan utama. Sebagai contoh, pemindai kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok telah meningkatkan efisiensi

customs clearance dari 0,55 jam menjadi 0,49 jam, dengan transparansi isi kontainer mencapai 100 persen. Ke depannya, pengawasan perairan, penyidikan kasus penyelundupan, serta sinergi operasi perbatasan darat dan laut akan terus diperkuat.

Kinerja Pengawasan di Wilayah Jawa Timur

Di Jawa Timur, Bea Cukai Kementerian Keuangan terus memperketat pemberantasan penyelundupan dengan pengawasan ketat di pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi barang ilegal. Sepanjang 2024, tercatat 4.215 penindakan dengan nilai barang yang ditegah mencapai Rp785 miliar, serta potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Rp293 miliar. Komoditas yang berhasil ditindak mencakup garmen, tekstil, besi baja, rokok, miras, dan narkotika.

Dalam konferensi pers pada 5 Februari 2025, delapan hasil penindakan utama di wilayah Jawa Timur dipaparkan, di antaranya:

1. Penyelundupan dua kontainer berisi 266 juta batang rokok ilegal dengan modus tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, dengan nilai barang Rp50,1 miliar dan potensi kerugian negara Rp356,6 miliar.

2. Penyelundupan MMEA eks impor sebanyak 40 ribu liter dengan nilai barang Rp6,9 miliar dan potensi kerugian negara Rp3 miliar.

3. Penyelundupan tekstil dan produk tekstil dengan modus pemberitahuan pabean tidak benar, dengan nilai barang Rp18,6 miliar dan potensi kerugian negara Rp5,6 miliar.

4. Penyelundupan mesin kendaraan bermotor sebanyak delapan unit dengan nilai barang Rp799,27 juta dan potensi kerugian negara Rp243,28 juta.

5. Penyelundupan produk elektronik dengan modus pemberitahuan pabean tidak benar, dengan nilai barang Rp12,8 miliar dan potensi kerugian negara Rp3,8 miliar.

6. Penyelundupan produk kosmetik dengan modus pemberitahuan pabean tidak benar, dengan nilai barang Rp7,2 miliar dan potensi kerugian negara Rp2,2 miliar.

7. Penindakan ekspor komoditas kayu rotan dan hewan tokek, serta impor barang bawaan berupa gading gajah yang tidak memenuhi ketentuan CITES, dengan nilai barang Rp2,2 miliar dan potensi kerugian negara Rp204 juta.

Diharapkan, upaya pengawasan kepabeanan dan cukai dapat terus berlanjut untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Bea Cukai Kementerian Keuangan akan terus meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar-kementerian serta lembaga guna mengoptimalkan efektivitas pemberantasan penyelundupan.

Kemenkeu dan BPK RI Gelar *Entry Meeting* Laporan Keuangan BA 015 dan LK BUN

Sebagai langkah awal dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA) 015 Kementerian Keuangan dan LK BA Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar entry meeting di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (13/02). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas keuangan negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemeriksaan atas laporan keuangan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap entitas pengelola keuangan negara untuk menjalani proses audit oleh BPK RI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya memaparkan bahwa kinerja APBN Tahun 2024 tetap terjaga di tengah gejolak global. Sebagai pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, Menkeu wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga yang dipimpinnya.

"Laporan Kementerian Keuangan BA 015 Tahun 2024 merupakan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian Keuangan. Kami memiliki 873 satker dari 12 unit eselon I, termasuk 7 Badan Layanan Umum

Entry Meeting
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BA 015 dan LK BUN) Tahun 2024
Tanggal 13 Februari 2025

(BLU). Sedangkan Laporan Keuangan BUN merupakan konsolidasi dari 10 satker besar yang merupakan bagian anggaran BUN yang dari sisi satker jumlahnya 788 satker," jelas Menkeu.

Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berupaya untuk terus menyusun laporan keuangan yang meningkat kualitasnya dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Saat ini Kementerian Keuangan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi risiko.

Entry meeting atau pertemuan awal adalah komunikasi sebelum pelaksanaan pemeriksaan di lapangan antara pimpinan Kementerian Keuangan dengan BPK RI sebagai tim pemeriksa. *Entry meeting* merupakan tahap penting dalam pemeriksaan yang dapat memengaruhi keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan. Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

"Pemeriksaan LK Kementerian Keuangan dan LK BUN 2024 meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Khusus pemeriksaan pada LK BUN 2024 termasuk juga pemeriksaan atas laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas," terang Daniel.

Pemeriksaan telah dilaksanakan sejak 7 Januari 2025 dan akan berlangsung sampai dengan 31 Mei 2025 yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. *Entry meeting* ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Keuangan sebagai pengguna anggaran dan BPK RI sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui *entry meeting* ini, Kementerian Keuangan dan BPK RI membahas berbagai aspek terkait pemeriksaan, termasuk ruang lingkup, metodologi, serta jadwal pelaksanaan audit. Diskusi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin timbul, serta menyusun strategi dalam rangka memastikan laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan prinsip tata kelola yang baik.

ORI027, SBN Ritel Pertama di 2025 Tetap Diminati di Tengah Ketidakpastian

Di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Surat Berharga Negara (SBN) tetap menjadi instrumen andalan dalam menopang pembiayaan APBN. Salah satu bentuknya adalah SBN Ritel, yang dirancang khusus bagi individu WNI. Tren penerbitan SBN yang terus meningkat, baik dari sisi nominal maupun jumlah investor, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian pembiayaan sekaligus mendorong transformasi upaya masyarakat menuju *investment society*.

Pada 2025, peran SBN Ritel semakin strategis, menawarkan alternatif instrumen investasi yang aman, menguntungkan, dan mudah diakses oleh masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga terus memperkuat basis investor domestik dan memperdalam pasar keuangan sebagai fondasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan asing yang sering kali lebih mahal dan berisiko. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap investasi, pemerintah berusaha memobilisasi dana domestik guna mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

Sepanjang 2025, pemerintah merencanakan penerbitan berbagai seri SBN Ritel, yang menawarkan pilihan beragam sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI027 dan ORI028, Sukuk Tabungan (ST) seri STO14 dan ST015, Sukuk Ritel (SR) seri SRO22 dan SR023, *Saving Bonds Retail* (SBR) seri SBR014, dan Sukuk Wakaf Ritel

(SWR) seri SWR006. Diversifikasi ini memberikan fleksibilitas bagi investor dalam memilih instrumen yang sesuai, baik dari sisi tenor, tingkat pengembalian, jenis kupon, aksesibilitas di pasar sekunder, hingga prinsip investasi syariah dan berkelanjutan (lingkungan, SDG, atau sosial).

Sebagai SBN Ritel pertama yang diterbitkan pemerintah pada 2025, ORI027 ditawarkan mulai 27 Januari hingga 20 Februari 2025. Seri ini merupakan SBN Ritel kelima yang menawarkan dua tenor, yaitu ORI027T3 dengan tenor 3 tahun dan ORI027T6 dengan tenor 6 tahun. Instrumen ini juga menawarkan kombinasi tingkat kupon yang menarik (fixed rate 6,65 persen p.a. untuk ORI027T3 dan *fixed rate* 6,75 persen p.a. untuk ORI027T6) dan risiko yang relatif rendah.

Mengusung tema "Pilihan Berharga, Untuk Sejahtera Bersama", ORI027 tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi pada pembangunan nasional, khususnya pengembangan sumber daya manusia agar terciptanya generasi Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di kancah global. Kemudahan akses dan pemesanan ORI027 melalui platform e-*SBN* turut menjadi faktor pendorong meningkatnya minat investor.

Penerbitan ORI027 berhasil mencetak rekor sebagai SBN Ritel dengan total penjualan dan jumlah investor terbesar sepanjang sejarah. Tercatat penjualan Rp37,35 triliun (ORI027T3 mencapai Rp32,96 triliun dan seri ORI027T6 tercatat Rp4,39 triliun) yang berasal dari dukungan 86.624 investor. Capaian ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh SR0008 pada 2016 dengan penjualan Rp31,5 triliun, serta jumlah investor tertinggi sebelumnya pada ST013 yang mencapai 70.467 investor. Yang menarik, salah satu faktor yang turut mendorong tingginya pemesanan ORI027 adalah reinvestasi dari SBN Ritel yang jatuh tempo di periode yang sama, yaitu SBR012T2 (Rp16,7 triliun, jatuh tempo 10 Februari 2025) dan ORI021 (Rp25,06 triliun, jatuh tempo 15 Februari 2025). Sebanyak 75 persen dari total penjualan ORI027 berasal dari reinvestasi kedua seri ini.

Beberapa temuan menarik dari profil investor ORI027 antara lain:

- Generasi Milenial mendominasi jumlah investor (46 persen), sedangkan dari sisi nominal masih didominasi oleh Generasi X (39 persen) dan *Baby Boomers* (35 persen).
- Pegawai Swasta menjadi kelompok profesi terbanyak (34 persen), namun dari sisi nominal investasi masih

didominasi oleh Wiraswasta (39 persen).

- Investor perempuan mendominasi, baik dari sisi jumlah (58 persen) maupun nominal investasi (50 persen).
- Ibu rumah tangga masuk dalam empat besar kelompok profesi investor, mencerminkan semakin luasnya pastisipasi masyarakat dalam investasi SBN.

Keberhasilan ORI027 tidak hanya mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi domestik, tetapi juga efektivitas strategi pemasaran pemerintah bersama mitra distribusi dalam meningkatkan literasi keuangan. Kampanye edukasi yang masif telah mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik serta manfaat berinvestasi dalam SBN.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan alternatif instrumen investasi yang aman, mudah dan menguntungkan bagi masyarakat. Langkah ini tidak hanya memperkuat kemandirian pembiayaan negara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dengan terus mendorong inklusi keuangan dan investasi yang bertanggung jawab, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Halaman Ini Dikosongkan

www.kemenkeu.go.id/apbnkita